

Mendesak, Sinkronisasi Provinsi dan Daerah



Gubernur: Kita Dukung agar Mentawai tak Tertinggal Lagi

Padang, Padek—Pembangunan seluruh sektor menjadi prioritas Pemprov Sumbar. Untuk itu, sinkronisasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/ kota harus dilakukan, termasuk sinkronisasi pembangunan hingga ke tingkat pusat.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Pembangunan 2022 bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di aula Kantor Gubernur, kemarin. Dalam rakor yang digelar selama 3 hari 8-10 Maret itu, gubernur berharap tercipta sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

► Baca *Mendesak...* Hal 7

BAHAS RENCANA PEMBANGUNAN: Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah diapit Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy (kanan) dan Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah saat Rakor Sinkronisasi Pembangunan Daerah di aula Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (9/3).

RUU Pemilu tak Masuk Prolegnas 2021

Pemerintah Belum Ajukan RUU ITE

Jakarta, Padek—Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dengan keputusan itu, maka tidak ada perubahan UU Pemilu pada tahun ini.

Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021 diambil dalam rapat kerja (raker) antara baleg dan pemerintah. Hadir dalam pertemuan itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. "Kami dan pemerintah sepakat mengeluarkan RUU Pemilu dari prolegnas prioritas,"

terang Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya usai rapat, kemarin (9/3). Menurut dia, kesepakatan itu diambil berdasarkan keputusan Komisi II yang menghentikan tahapan pembahasan RUU Pemilu. Jadi, sikap baleg merujuk pada keputusan Komisi II yang merupakan pengusul

RUU Pemilu. Willy mengatakan, setelah RUU Pemilu dicabut, kemarin pemerintah mengusulkan RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bagaimana dengan RUU Informasi

► Baca *RUU...* Hal 2

terbuka

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

(QS. Al Fath: 18)

Jadwal Shalat

SUBUH	05.11	Koreksi Waktu: Alaharpanang -1 menit, Air Bangis + 4 menit, Balai Selasa -1 menit, Balusangka -1 menit, Dharmasraya -3 menit, Muara Labuh -2 menit, Painsi -1 menit, Sibung -2 menit, Sawahlunto -1 menit, Simp Empat +2 menit, Solok -1 menit, Sei Lima +1 menit
ZUHUR	12.32	
ASHAR	15.37	
MAGHRIB	18.36	
ISYA	19.44	

MAKLUMAT

SEHUBUNGAN Kamis (11/3) merupakan hari libur nasional Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW, *Padang Ekspres* tidak terbit. Kami akan terbit kembali seperti biasa Jumat (12/3). Kepada pembaca dan relasi harap maklum.

Penerbit

TERAS UTAMA

Vaksinasi Mandiri: Strategi Jitu atau Keliru?

SEIRING sedang berlangsungnya proses program vaksinasi Covid-19 nasional, yang telah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021. Wacana vaksin mandiri (berbayar) menjadi ke Gundahan pro dan kontra dari masyarakat dan juga para tenaga kesehatan dan relawan Covid-19 saat ini. Betapa tidak? Dari berbagai komentar yang muncul, isu ini dikaitkan dengan isu komersial dan bisnis, keadilan, dan ada juga beranggapan merusak tatanan program vaksinasi yang berjalan saat ini, dan tentunya juga ada berpendapat. Semua ini merupakan upaya akselerasi percepatan dari program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Apakah vaksin mandiri ini merupakan strategi jitu yang diambil pemerintah? Atau, sebuah kekeliruan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Partisipasi Masyarakat untuk di Vaksin

Hasil program vaksinasi tentunya diharapkan efektif terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok/komunal), dan berdampak terhadap produktivitas sosial dan ekonomi ke depan. Saat ini, ketika efikasi vaksin sudah terpenuhi dan diikuti kehalalan vaksin sudah dijamin.

► Baca *Suhatri Bur...* Hal 2



Defriman Djafri
Dekan FKM Unand/
Ketua PAEI Sumbar

Verifikasi dan Validasi Guru Agama Honorer

Antisipasi Kemenag jelang Rekrutmen Guru PPPK

Jakarta, Padek—Kementerian dan lembaga terkait mulai membahas nasib guru agama dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sayangnya, tetap tak ada kepastian adanya kuota guru agama dalam rekrutmen sejuta guru PPPK.

Sekjen Kemenag Nizar menuturkan, rapat lintas kementerian dan lembaga itu digelar Jumat (5/3) pekan lalu. Selain Kemenag, juga ada perwakilan dari Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa formasi PPPK untuk guru agama honorer masih sangat terbatas. Yakni, hanya sekitar 9.000 kursi untuk guru honorer kategori

dua (K2). Padahal, jumlah guru agama yang masi honorer di lapangan sangat banyak. Data Kemenag menyebutkan, saat ini tidak kurang ada 120 ribu guru agama berstatus honorer.

"Kami semua masih mengupayakan agar mereka (guru agama honorer, red) bisa masuk dalam usulan PPPK Kemendikbud," katanya, kemarin (9/3). Nizar melanjutkan, nantinya Kemenag bertugas membuat soal ujian untuk seleksi calon PPPK formasi guru agama. Dia menegaskan, pemerintah masih berupaya mencari jalan keluar.

Menurut Nizar, pembahasan nasib guru agama di dalam agenda rekrutmen PPPK itu sangat penting. Sebab, status guru agama terbagi menjadi tiga. Yakni, guru agama yang diangkat oleh Kemenag, diangkat oleh Kemendikbud, dan diangkat oleh pemerintah daerah.

"Saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data. Berapa total guru agama dengan status honorer di sekolah," jelas mantan

► Baca *Verifikasi...* Hal 2

Ketersediaan dan Kekurangan Guru PAI SD

▶ Kebutuhan	: 118.302 orang
▶ Ketersediaan	: 76.509 orang
▶ Kekurangan	: 42.243 orang

SMP

▶ Kebutuhan	: 32.442 orang
▶ Ketersediaan	: 16.820 orang
▶ Kekurangan	: 15.602 orang

SMA

▶ Kebutuhan	: 13.867 orang
▶ Ketersediaan	: 6.455 orang
▶ Kekurangan	: 7.412 orang

SMK

▶ Kebutuhan	: 10.809 orang
▶ Ketersediaan	: 4.354 orang
▶ Kekurangan	: 7.083 orang

Sumber: AGPAI dan Kemenag 2017.



BPOM: Vaksin AstraZeneca Aman untuk Lansia

Jakarta, Padek—Sehari pascakedatangan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkannya Emergency Use Authorization (EUA). Hadirmya vaksin ini diharapkan dapat mendorong perekonomian tanah air.

Senin lalu (8/3), vaksin Covid-19 AstraZeneca tiba di Terminal Kargo, Bandara Soekarno-Hatta. Vaksin AstraZeneca tersebut datang setelah mendapatkan persetujuan pemasangan obat jalur khusus atau Special Access Scheme (SAS) pada tanggal 6 Maret lalu. Jumlah vaksin yang diterima pada tahap awal ini adalah sebanyak 1.113.600 dosis vaksin dan disimpan di gudang PT Bio Farma di Bandung. "Dilanjutkan dengan pengambilan sampel dan pemeriksaan fisik vaksin oleh tim dari BPOM dan Balai Besar POM di Bandung hari ini (kemarin, red)," kata Kepala BPOM Penny K Lukito, kemarin (9/3).

Lebih lanjut Penny menyatakan, vaksin yang dikembangkan oleh Oxford University

► Baca *BPOM...* Hal 2

Strategis UMKM Bertahan di Masa Pandemi Enggan PHK Karyawan, Kini justru Tambah Gerai

Tak ada yang meragukan kehebatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. Dihantam badai pandemi Covid-19 pun, UMKM tetap bertahan.

TIM JPG—Bukittinggi & Yogyakarta

SRI Engla Deswita dan Widi Fajar Widyatmoko adalah dua pengusaha yang bisa mewakili kisah inspiratif UMKM. Mereka enggan mengubur mimpi akibat hantaman pandemi.

Kepada *Jawa Pos* (grup *Padang Ekspres*), Uni Adek—sapaan Sri Engla Deswita—bercerita, dirinya tak pernah mengira bisnis rendang kemasan yang dirintisnya sejak 2017 harus melewati cobaan badai pandemi.

"Sebelum pandemi, saya baru saja pindah outlet dari ukuran kecil ke yang besar. Tujuannya agar memu-



BERTAHAN: Uni Adek, nasabah binaan Bank BRI dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI Bukittinggi.

dahkan wisatawan. Lalu, saat muncul corona Maret 2020, sudah itu otomatis wisatawan hilang. Hilang total," ujar perempuan asal Bukittinggi, Sumbar, itu Kamis (4/3).

Pemilik usaha Rendang Unadek itu menyatakan, ekspansi memang sengaja dilakukan agar usahanya berkembang. Meski usaha yang dilakoninya tertekan, Uni tak pernah berpikir untuk mandek di tengah jalan.

Apalagi, dia memiliki karyawan yang menggantungkan hidup pada Rendang Unadek. Diimpit pilihan yang serbasulit, dia pun putar otak. Bukannya memecat karyawan, Uni justru mempertahankan seluruh pegawainya.

"Saya punya prinsip, kalau kita membuka rezeki orang, insya Allah rezeki kita terbuka juga. Saya nggak lakukan pengurangan karyawan sama sekali," tuturnya.

► Baca *Enggan...* Hal 7

